



SIARAN PERS

Pusat Hubungan Masyarakat
Gd. I Lt. 2, Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110
Telp: 021-3860371/Fax: 021-3508711
www.kemendag.go.id



Perkuat Sistem Logistik Nasional, Bappebti Kumpulkan 100 Stakeholders SRG dan PL

Jakarta, 4 Februari 2015 – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mempertegas pentingnya sistem logistik nasional melalui pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL). Untuk itu, hari ini (4/2), Bappebti mengumpulkan 100 pemangku kepentingan (*stakeholders*) pelaksanaan SRG dan PL di Kantor Bappebti Jakarta dalam Pertemuan Tahunan Pemangku Kepentingan SRG dan PL.

"Bappebti ingin merangkul semua stakeholders untuk mendukung kesuksesan percepatan implementasi SRG dan PL guna memperkuat sistem logistik nasional dan mendorong pertumbuhan di daerah," tegas Kepala Bappebti Sutriyono Edi.

Para pemangku kepentingan yang hadir di antaranya para pengelola gudang, lembaga penilaian kesesuaian, perbankan, asuransi, kementerian terkait, Kepala Dinas berbagai kabupaten dan provinsi yang memiliki gudang SRG, BUMN, dan asosiasi.

Sutriyono menegaskan dalam sistem logistik nasional, SRG dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional, khususnya terkait bahan pangan seperti beras, gabah, dan jagung. Hal ini dimungkinkan karena data ketersediaan stok di setiap gudang SRG terintegrasi melalui suatu Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE).

"SRG juga berperan penting sebagai sarana penyimpanan logistik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang dapat mewujudkan ketahanan pangan," jelasnya. SRG selama ini dijadikan instrumen pemasaran untuk memperoleh harga terbaik dengan cara menyimpan komoditas di gudang saat panen raya dan harga juga cenderung rendah. Dengan mekanisme ini, petani dapat memperoleh harga terbaik dan meningkatkan pendapatannya.

Sutriyono menjelaskan, pemerintah sangat berkepentingan meningkatkan kualitas produk komoditas dalam negeri, antara lain dengan penciptaan instrumen pembiayaan perdagangan yang mudah dimanfaatkan para pelaku usaha, khususnya petani/UKM, dengan jaminan komoditas yang dimiliki guna mendapatkan modal kerja.

Bagi Sutriyono, langkah memperkuat sistem logistik nasional melalui SRG ini merupakan persiapan penting menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015. *"Daya saing menjadi kata kunci guna memastikan kesiapan setiap negara di kawasan dalam memasuki MEA 2015. Kita harus mampu memperoleh manfaat optimal ketika keran MEA dibuka,"* tuturnya.

Tiga Pilar Dukung Nawa Cita

Pada kesempatan itu, Sutriyono juga menyampaikan bahwa, *"Bappebti mendukung pencapaian misi Presiden RI guna mewujudkan bangsa yang berdaya saing melalui program prioritas Nawa Cita."* Sebagai implementasi Nawa Cita, Bappebti mengusung tiga pilar penting.

Pertama, Bappebti mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui percepatan implementasi SRG sebagai sarana tunda jual dan alternatif pembiayaan bagi petani, UKM, koperasi, dan pelaku usaha. Kedua, Bappebti meningkatkan efisiensi mata rantai perdagangan dan menciptakan sarana pembentukan harga melalui PL Komoditas. Ketiga, Bappebti meningkatkan daya saing perdagangan melalui optimalisasi pemanfaatan perdagangan berjangka komoditas sebagai sarana pengelolaan resiko, referensi harga, dan sarana investasi.

Kepastian Harga

Dalam kesempatan itu, Sutriyono juga menyinggung bahwa selain SRG, PL merupakan salah satu instrumen menentukan harga yang transparan. *"PL bertujuan memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan usaha, serta menjamin penyerahan komoditas sesuai kebutuhan dimana pelaku usaha atau penjual dan pembeli langsung bertemu,"* ujarnya. Saat ini, dilakukan revitalisasi PL Komoditas melalui penguatan kelembagaan, sinergi antara PL Komoditas dan SRG, serta pengawasan dan penegakan hukum.

"Tujuan revitalisasi ini membentuk penyelenggara PL Komoditas yang mandiri dan profesional, dalam arti tidak bergantung pada dana APBN/APBD dan fokus pada pengembangan PL," lanjut Sutriyono.

Tahun 2014, revitalisasi PL dilakukan di 5 daerah dari 13 penyelenggara PL, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Kelima daerah tersebut seluruhnya diberikan persetujuan sebagai penyelenggara PL kepada pihak swasta. Lima penyelenggara PL Komoditas yang telah diberikan persetujuan, yaitu Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah, Koperasi Pegawai Negeri Praja Bali, Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat dan PT. Puspa Agro di Sidoarjo, dan Koperasi Pusat Komoditi dan Pasar Lelang Agro (PUSKOMPAS) Makassar.

Perkembangan SRG

Sejak 2009 sampai 2013, Kemendag telah membangun gudang SRG, baik menggunakan Dana Stimulus Fiskal, APBN-P, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 98 gudang. Pada 2014, pembangunan gudang SRG yang dialokasikan dari DAK berjumlah 19 gudang atau bertambah 2 gudang dari tahun sebelumnya, sehingga gudang yang dibangun ada 117.

Selama periode 2008-2014 telah diterbitkan 1.873 resi gudang dengan volume barang 72.508,15 ton yang terdiri dari 62.016,80 ton gabah; 4.628,15 ton jagung; 5.417,72 ton beras; 25,49 ton kopi; dan 420 ton rumput laut. Total nilainya mencapai Rp 369,38 miliar. Dari jumlah tersebut telah diagunkan sebanyak 1.584 resi gudang dengan nilai mencapai Rp 230,16 miliar.

Pada 2014 saja, resi gudang yang diterbitkan mencapai 605 resi dengan volume barang 21.649,27 ton dan nilai transaksi Rp 116,5 miliar. Jika dibandingkan dengan 2013, resi gudang yang diterbitkan tumbuh 5% dengan volume barang tumbuh 8%. Begitu pula nilai transaksi SRG meningkat 9% dari tahun sebelumnya. Sedangkan nilai pembiayaan di 2014 juga menunjukkan peningkatan sebesar 12% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan komoditas, pada 2014, jumlah resi gudang yang diterbitkan paling banyak adalah komoditas gabah (93,1%), beras (4,6%), jagung (2,1%), dan kopi (0,2%). Sedangkan nilai transaksi resi gudang tertinggi adalah gabah (88%), jagung (5,4%), beras (6,5%), dan kopi (0,2%). Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan 2013, dimana komoditas gabah masih mendominasi baik dalam jumlah resi gudang yang diterbitkan (89,1%) maupun nilai resi gudangnya (83,9%). Akan tetapi di 2013 masih terdapat penerbitan resi rumput laut, sedangkan pada 2014 tidak ada sama sekali.

Perkembangan PL Komoditas

Pada 2014 terdapat 14 penyelenggara PL Komoditas yang dibiayai APBN dan APBD, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta. Penyelenggaraan PLK oleh pihak swasta dilakukan PT. iPASAR Indonesia dan Pasar Fisik CPO Bursa Berjangka Jakarta.

Sepanjang 2014, nilai transaksi PL Komoditas tercatat Rp 725,8 miliar dengan 5 besar komoditas yang mempunyai nilai transaksi terbesar adalah Beras (246,37 M), Jagung (81,62 M), Sapi (61,51 M), Kakao (27,33 M) dan Ikan Nila (24,08 M). Selama 2004 sampai 2014, pelaksanaan PL Komoditas membukukan transaksi sekitar Rp 14 triliun.

--selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi:

Ani Mulyati
Kepala Pusat Humas
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-3860371/021-3508711
Email: pusathumas@kemendag.go.id

Sri Nastiti
Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-31922443/021-31922460
Email: sri.nastiti@kemendag.go.id